

BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 3,50%

SINERGI MENJAGA STABILITAS DAN MEMPERKUAT PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 9-10 Februari 2022 memutuskan untuk mempertahankan:

BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar **3,50%**

Suku Bunga Deposit Facility (DF) sebesar **2,75%**

Suku Bunga Lending Facility (LF) sebesar **4,25%**

Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, serta upaya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, di tengah tekanan eksternal yang meningkat. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka akselerasi vaksinasi dan pembukaan sektor-sektor ekonomi, koordinasi fiskal dan moneter, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas, untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pemulihan ekonomi nasional.

PROSPEK 2022

**PERTUMBUHAN EKONOMI
4,7%-5,5%**

**TRANSAKSI BERJALAN
Defisit 1,1%-1,9% dari PDB**

**INFLASI
3,0% ± 1%**

ASESMEN



1. EKONOMI GLOBAL

Ekonomi global tumbuh sesuai prakiraan meski masih dibayangi risiko yang bersumber dari kenaikan kasus Covid-19 varian Omicron, percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa bank sentral, dan meningkatnya tensi geopolitik.

**Prakiraan 2022
4,4%**



2. EKONOMI DOMESTIK

Momentum perbaikan ekonomi nasional berlanjut pada 2022.

**2021
3,69% (yoy)**



3. NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (NPI)

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap baik.

**↑ 0,17% (ptp)
dibandingkan level Januari 2022**

**0,27%
(rerata)**

9 Februari 2022 9 Februari 2022



4. NILAI TUKAR RUPIAH

Nilai tukar Rupiah terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat.

**↑ 0,17% (ptp)
dibandingkan level Januari 2022**

**0,27%
(rerata)**

9 Februari 2022 9 Februari 2022



5. INFLASI

Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian.



6. LIKUIDITAS

Kondisi likuiditas yang tetap longgar sejalan dengan dampak sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Quantitative Easing

Rp10,34 triliun

hingga 8 Februari 2022

Pembelian SBN di Pasar Perdana untuk Pendanaan APBN

Rp3,56 triliun

hingga 8 Februari 2022



7. SUKU BUNGA

Suku bunga perbankan terus mengalami penurunan didukung oleh suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah, likuiditas yang longgar dan persepsi risiko yang membaik.

PUAB Overnight

↓ 2,79%
25 bps

Des 2020 - Des 2021

Deposito 1 Bulan

↓ 2,96%
131 bps

Des 2020 - Des 2021



SBDK

8,70%

Des 2021



8. STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan secara bertahap.

9. SISTEM PEMBAYARAN

Bank Indonesia akan melanjutkan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi serta ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien.

Nilai Transaksi:

Uang Elektronik
Rp34,6 triliun
66,65% (yoy)

Digital Banking
Rp4.314,3 triliun
62,82% (yoy)

Kartu ATM, Kartu Debet, dan Kartu Kredit
Rp711,2 triliun
14,39% (yoy)

Uang Kartal yang Diedarkan (UYD)
Rp885,2 triliun
10,21% (yoy)

Januari 2022

Januari 2022

Januari 2022

Januari 2022

BAURAN KEBIJAKAN

- Memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi.
- Mempertegas normalisasi kebijakan likuiditas yang diumumkan pada tanggal 20 Januari 2022 melalui Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah sebagai berikut:
 - Kenaikan secara bertahap GWM Rupiah untuk BUK (Bank Umum Konvensional) yang saat ini sebesar 3,0% dengan pemenuhan secara rata-rata dan 0,5% secara harian menjadi sebagai berikut:
 - Berlaku mulai 1 Maret 2022, GWM dinaikkan 1,5%, sehingga menjadi 5,0% dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi sebesar 4,0% dari DPK.
 - Berlaku mulai 1 Juni 2022, GWM dinaikkan 1%, sehingga menjadi 6,0% dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi sebesar 5,0% dari DPK.
 - Berlaku mulai 1 September 2022, GWM dinaikkan 0,5%, sehingga menjadi 6,5% dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan remunerasi sebesar 1,5% terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan remunerasi sebesar 5,5% dari DPK.
 - Berkenaan secara bertahap GWM Rupiah untuk BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) yang saat ini sebesar 3,0% dengan pemenuhan secara rata-rata dan 0,5% secara harian menjadi sebagai berikut:
 - Berlaku mulai 1 Maret 2022, GWM dinaikkan 0,5%, sehingga menjadi 4,0% dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan pemberian ('athaya) sebesar 1,5% terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan pemberian ('athaya) sebesar 3% dari DPK.
 - Berlaku mulai 1 Juni 2022, GWM dinaikkan 0,5%, sehingga menjadi 4,5% dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan pemberian ('athaya) sebesar 1,5% terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan pemberian ('athaya) sebesar 3,5% dari DPK.
 - Berlaku mulai 1 September 2022, GWM dinaikkan 0,5%, sehingga menjadi 5% dengan pemenuhan seluruhnya secara rata-rata. Bank yang memenuhi kewajiban GWM tersebut akan mendapatkan pemberian ('athaya) sebesar 1,5% terhadap pemenuhan GWM, dengan bagian yang diperhitungkan untuk mendapatkan pemberian ('athaya) sebesar 4% dari DPK.
- Memperluas penggunaan Local Currency Settlement (LCS) sebagai sarana untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi bilateral dengan negara-negara mitra utama, khususnya Asia.
- Memperluas penggunaan QRIS dari semula Rp5 juta menjadi Rp10 juta per transaksi, berlaku sejak 1 Maret 2022 untuk mendorong konsumsi masyarakat dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
- Memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan pendalaman perbandingan spread suku bunga kredit perbankan terhadap negara kawasan.
- Meningkatkan limit transaksi QRIS dari semula Rp5 juta menjadi Rp10 juta per transaksi, berlaku sejak 1 Maret 2022 untuk mendorong konsumsi masyarakat dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
- Memperluas penggunaan Local Currency Settlement (LCS) sebagai sarana untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi bilateral dengan negara-negara mitra utama, khususnya Asia.
- Memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseksan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.

Pindai
untuk
informasi
lebih
lengkap

